

**PERAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM TINGKAT
KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI IFRS**

INDONESIA

Wardani Prawinandi
(**Alumni Jurusan Akuntansi FE UNS**)
Djoko Suhardjanto
(**Dosen Akuntansi FE UNS**)
Hanung Triatmoko
(**Dosen Akuntansi FE UNS**)

Abstract

This study aims to determine the level of compliance with mandatory disclosure convergence of International Financial Reporting Standards (IFRS) in service companies, as well as to determine the effect of the structure of corporate governance (CG) to the level of compliance with the mandatory disclosure. Structure of corporate governance measured by the number of commissioners, the proportion of independent commissioners, educational background of presiden commissioner, the proportion of women commissioners and the number of audit committee members.

These results indicate that the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS in the service companies is 69,900%. The multiple regression test showed that structure of corporate governance affects the level of compliance with mandatory disclosure convergences of IFRS. Corporate governance structure variables that affect compliance is the proportion of independent commisioners and the number of audit committee. Other variables, namely the number of commissioner, educational background of president commisioner, the proportion of women commissioners, number of board of director members, profitability and leverage had no effect on the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS.

Keywords: structure of corporate governance, convergence of International Financial Reporting Standards, the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS and service companies.

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) pada perusahaan jasa, serta untuk mengetahui pengaruh struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan

komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* tersebut.

Pengungkapan wajib merupakan hal yang penting bagi perusahaan jasa karena saat ini sektor jasa telah berkembang pesat seperti halnya perusahaan manufaktur, sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya di sektor jasa (Haryono, 2006). Perkembangan ini membuat sektor jasa membutuhkan sumber pendanaan dari kreditor dan investor. Untuk melindungi kepentingan *stakeholders* ini diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan.

Informasi yang tidak diungkapkan ini dapat merugikan *stakeholders*, salah satunya adalah kasus PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8,000 triliun. Akibat kasus ini, Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Prayogi, 2011).

Kasus PT Bakrie & Brothers, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009).

Fokus penelitian ini pada laporan laba rugi karena laporan laba rugi merupakan bagian dari *annual report* yang paling dilihat *stakeholders* sebagai bahan pengambilan

keputusan mereka (Lynch, 2000). Laporan ini penting karena paling dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode (EF, 1999).

Adopsi peraturan pengungkapan saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukan sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin et al., 2009). *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008), dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001), sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit. Struktur *corporate governance* tersebut antara lain jumlah anggota dewan komisaris (Al-Akra et al., 2010), proporsi komisaris independen (Akhtaruddin et al., 2009), latar belakang pendidikan komisaris utama (Suhardjanto dan Afni, 2009), proporsi komisaris wanita (Feijoo et al., 2012) dan jumlah anggota komite audit (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010).

Penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS sudah dilakukan oleh beberapa orang, antara lain oleh Tsalavoutas et al. (2008) di Yunani; Al-Akra et al. (2010) di Yordania; Tsalavoutas dan Dionysiou (2011) di Yunani, namun belum pernah dilakukan di Indonesia. Pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS pernah diteliti oleh Al-Akra et al. (2010) namun variabel struktur *corporate governance* yang digunakan hanya ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit. Penelitian yang sejalan dengan ini belum pernah dilakukan di Indonesia, khususnya yang berfokus pada laporan laba rugi perusahaan jasa.

Motivasi penelitian ini yang pertama adalah karena penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sudah dilakukan di berbagai negara, namun belum pernah dilakukan di Indonesia, khususnya yang meneliti pada laporan laba rugi perusahaan jasa. Kedua, ingin mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan jasa. Ketiga, ingin mengetahui pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

II. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

A. *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS (Variabel Dependen)

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat 2 sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008). *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al-Akra et al., 2010)

Mandatory disclosure dalam laporan keuangan telah diatur standar akuntansi internasional IFRS. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penerapan

IFRS. Konvergensi IFRS memiliki arti menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan di antara keduanya (Chen, 2009). Adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara (Gamayuni, 2009), sedangkan harmonisasi artinya adalah proses untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam (Perramon dan Amat, 2007).

Saat ini 110 negara mengharuskan agar perusahaan publik di negaranya menggunakan IFRS sebagai dasar pelaporan akuntansi perusahaan, di antaranya Argentina, Canada, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan (Drennan dan Mariglia, 2010) dan Uni Eropa (Andres et al., 2009). Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2012). Indonesia melakukan konvergensi IFRS secara bertahap sejak 2008 hingga 2011 dimana tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008).

B. Struktur *Corporate Governance* (Variabel Independen)

Menurut FCGI (2001), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena

adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan (Herwidayatmo, 2000).

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008). Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *Two Tiers System*, artinya perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001). Lebih lanjut, Novianti (2009) menjelaskan bahwa struktur *corporate governance* di Indonesia terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur¹ *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan. Inti dari *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001), sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris, yaitu komite audit. Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian di atas.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Inti dari *corporate governance* Indonesia ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Muntoro, 2005). Menurut Undang-uundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Penelitian Kent dan Stewart (2008) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pengertian struktur adalah 1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan 2) yang disusun dengan pola tertentu 3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda 4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda, dan pengertian struktur yang diambil penulis adalah yang ke 1

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Hasil penelitian Al-Akra et al. (2010) di Aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₁: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengatur agar perusahaan yang *listed* di bursa mempunyai komisaris independen minimal 30,000% dari jumlah anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside directors*, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris (FCGI, 2001). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Penelitian Cheng dan Courtenay (2004) di Singapura menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

KNKG (2006) mengungkapkan bahwa tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama akan mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Salah satu keputusan yang dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang *mandatory disclosure* yang akan dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₃: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Proporsi Komisaris Wanita

Menurut Adams dan Ferreira (2004) komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka. Komisaris wanita juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti et al., 2007). Penelitian Feijoo et al. (2012) di Australia, Jepang dan UK menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

H₄: Proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Jumlah Anggota Komite Audit

FCGI (2001) menjelaskan bahwa agar dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. SE-03/PM/2000 mewajibkan semua perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Penelitian Kent dan Stewart (2008) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure*. Hasil penelitian Al-Akra et al. (2010) di Yordania menunjukkan bahwa jumlah komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₅: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

III. Metode Penelitian

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010, yaitu sebanyak 473 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penggolongan perusahaan jasa ini menggunakan *Jakarta Stock Industrial Classification Index* (JASICA INDEX) yang

tercantum dalam *IDX Fact Book* 2010 dan 2011. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang menyampaikan *annual report* ke BEI² dan mengungkapkan informasi struktur CG lengkap dalam *annual report*nya. Tahun tersebut dipilih karena tahun 2008 merupakan awal dimana Indonesia mendeklarasikan program konvergensi PSAK terhadap IFRS (Husin, 2008), dimana konvergensi ini dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 hingga 2011. Sebagian hasil konvergensi PSAK ini baru dapat diterapkan untuk laporan keuangan periode 2009 dan sesudahnya.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *annual report* perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2009 dan 2010. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari situs www.idx.co.id.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel dependen (tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Identifikasi item pengungkapan menggunakan Deloitte IFRS *Presentation and Disclosure Checklist* (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010). Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk periode 2009 dan 2010. Rincian item pengungkapan dapat dilihat pada lampiran I dan rincian jumlah item dapat dilihat pada tabel 1.

(Insert Tabel 1)

Item yang perlu diungkapkan untuk tahun 2009 meliputi semua IAS di atas, selain IAS 23 *Borrowing Costs* sehingga total item maksimum yang perlu diungkapkan adalah 78 item, sedangkan untuk tahun 2010 item yang perlu diungkapkan meliputi semua IAS di atas

² Sampai tanggal 28 November 2011

sehingga total item maksimum yang perlu diungkapkan adalah 80 item. IAS 23 *Borrowing Costs* diterapkan untuk periode 2010 karena tanggal efektifnya adalah mulai tahun 2010.

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0, serta N/A jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan (Apostolou dan Nanopoulos, 2009). Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *Partial Compliance Weighted (PC Weighted)*, yakni menjumlahkan item yang diungkapkan oleh perusahaan kemudian membagi hasilnya dengan total item yang *applicable* dalam tiap perusahaan (Tsalavoutas et al., 2008). Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ini adalah:

$$MANDSCORE_{BY} = \frac{\sum SCORE_{iBY}}{\sum MAX_{iBY}}$$

$MANDSCORE_{iBY}$ menunjukkan skor pengungkapan perusahaan jasa B pada tahun Y, MAX_{iBY} menunjukkan nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan jasa B pada tahun Y, i menunjukkan Item dalam *framework*, $SCORE_{iBY}$ menunjukkan skor untuk item i , perusahaan jasa B tahun Y.

2. Variabel independen (struktur *corporate governance*)

a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris adalah banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan (KNKG, 2006).

b. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen adalah perbandingan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak terafiliasi) dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Haniffa dan Cooke, 2005), dimana ukuran yang digunakan oleh Haniffa dan Cooke (2005) adalah dengan membagi jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

c. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Latar belakang pendidikan komisaris utama adalah latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh komisaris utama (Suhardjanto dan Afni, 2009). Latar belakang pendidikan ini diukur dengan variabel *dummy*, dimana jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis diberi kode 1, selain ekonomi atau bisnis diberi kode 0 (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

d. Proporsi Komisaris Wanita

Proporsi komisaris wanita adalah perbandingan jumlah anggota komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Nalikka, 2009), dimana ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Feijoo et al., 2012).

e. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Zaluki dan Husin, 2009).

3. Variabel Kontrol

a. Jumlah Anggota Dewan Direksi

Menurut KNKG (2006), direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan strategis dalam perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi diukur dari banyaknya anggota direksi masing-masing perusahaan, sesuai yang digunakan dalam penelitian Suhartini (2006).

b. Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Apostolou dan Nanopoulos, 2009). Profitabilitas diukur dengan membandingkan pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas, seperti yang digunakan (Fekete et al., 2009).

c. *Leverage*

Leverage adalah rasio utang terhadap ekuitas perusahaan (Sejjaaka, 2004). *Leverage* diukur dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan (Lama et al., 2010).

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS *Release* 16. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2010). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis ini adalah:

$$MANDSCORE = \beta_0 + \beta_1 KOM + \beta_2 KOMIN + \beta_3 PEND + \beta_4 KOMWAN + \beta_5 KOMAUDIT + \beta_6 DIR + \beta_7 PROF + \beta_8 LEV + e$$

MANDSCORE menunjukkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, KOM menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris, KOMIN menunjukkan proporsi komisaris independen, PEND menunjukkan latar belakang pendidikan komisaris utama, KOMWAN menunjukkan proporsi komisaris wanita, KOMAUDIT menunjukkan jumlah anggota komite audit, DIR menunjukkan jumlah anggota dewan direksi, PROF menunjukkan profitabilitas, LEV menunjukkan *Leverage*, β menunjukkan koefisien regresi dan e menunjukkan *error*.

IV. Analisis dan Pembahasan

Deskriptif Data

Tabel 2 menggambarkan hasil penghitungan statistik deskriptif variabel dependen tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

(Insert Tabel 2)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah 69,900%. Nilai minimumnya adalah 53,500% dan nilai maksimumnya adalah 87,500%. Rerata tingkat kepatuhan pengungkapan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian pengungkapan wajib IFRS yang dilakukan di Yordania, yaitu sebesar 79,000% (Al-Akra et al., 2010) dan Yunani, yang juga sebesar 79,000% (Tsalavoutas dan Dionysiou, 2011). Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* masing-masing IAS tertinggi selama tahun 2009 dan 2010 adalah IAS 16 *Property, Plant and Equipment* dimana rerata tingkat kepatuhan untuk tahun 2009 adalah 78,466% dan tahun 2010 sebesar 81,652%. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* tertinggi kedua adalah IAS 2 40 *Investment Property*. Rerata tingkat kepatuhan tahun 2009 adalah 66,628% dan tahun 2010 sebesar 69,789%.

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif variabel independen dan variabel kontrol.

(Insert Tabel 3)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini telah mematuhi peraturan terkait *corporate governance* yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki jumlah anggota dewan komisaris minimal 1 orang, memiliki proporsi komisaris independen minimum 30,000% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, memiliki jumlah anggota komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 anggota lainnya yang berasal dari luar perusahaan, serta memiliki jumlah anggota dewan direksi lebih dari yang disyaratkan, yakni 1 orang. Hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan jasa dalam penelitian memiliki komisaris utama yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, proporsi komisaris wanita dalam perusahaan jasa di Indonesia masih rendah, yakni hanya 11,000%, rerata profitabilitas adalah 12,300% serta rerata *leverage* adalah 2,554.

Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian regresi telah dilakukan uji asumsi klasik dan hasilnya menunjukkan bahwa semua kriteria uji asumsi klasik telah terpenuhi. Pengujian regresi berganda dilakukan dengan metode *backward*³ yang menghasilkan tujuh model persamaan regresi dengan *p-value* yang berbeda-beda. Model yang dipilih adalah model ketujuh karena memiliki nilai ANOVA tertinggi, yaitu 8,649 dan *p-value* 0,000, artinya model ini merupakan model yang paling signifikan untuk memprediksi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Nilai R^2 sebesar 0,079 dan nilai *adjusted R*² sebesar 0,070. Berdasarkan nilai *adjusted R*² tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7,000% variabel dependen

³ Metode *backward* adalah salah satu metode regresi yang dimulai dengan model yang mencakup semua variabel independen, kemudian satu per satu variabel independen yang kurang signifikan akan dihapus dan hingga akhirnya diperoleh model persamaan regresi yang paling signifikan (Loucks, 2003).

dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda.

(Insert Tabel 4)

Jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS (*p-value* $0,980 < 0,050$) karena jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi sulit, panjang dan bertele-tele, sedangkan jumlah anggota yang kecil menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi (Muntoro, 2005) sehingga tidak dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Courtenay (2004) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan.

Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS (*p-value* $0,001 < 0,050$ dan koefisien positif 0,112). Adanya pengaruh positif ini disebabkan karena dengan makin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Muntoro (2005) juga menjelaskan bahwa komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan Huafang dan Jianguo (2007) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ($p\text{-value } 0,829 > 0,050$). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Permatasari (2010), dimana hasilnya menunjukkan bahwa bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak mempengaruhi *environmental disclosure*. Tidak adanya pengaruh latar belakang pendidikan ini disebabkan karena bidang latar belakang pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini hanya ekonomi dan bisnis (Suhardjanto dan Permatasari, 2010), dimana terdapat kemungkinan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan dapat yang dapat menunjang kelangsungan bisnis perusahaan lebih diperlukan (Kusumastuti, Supatmi dan Sastra, 2007).

Proporsi komisaris wanita wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ($p\text{-value } 0,909 > 0,050$). Ini dapat terjadi karena Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah) dimana pria dianggap sebagai pemegang kontrol dan pengambil keputusan utama (Anjani, 2009). Karena sistem ini, berapapun proporsi komisaris wanita tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nalikka (2009) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak mempengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan, termasuk di dalamnya pengungkapan wajib.

Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ($p\text{-value } 0,019 < 0,050$ dan koefisien negatif 0,018). Ini dapat terjadi karena jumlah anggota yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) dan jumlah anggota yang kecil dianggap lebih efektif, aktif dan dinamis (Zhou dan Panbunyuen, 2008). Jika jumlah anggota komite audit

terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Felo et al. (2003) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana kualitas tersebut diukur melalui pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah anggota dewan direksi tidak berpengaruh ($p\text{-value } 0,591 > 0,050$) dikarenakan di Indonesia terdapat fenomena dimana *corporate governance* hanya dipandang sebagai pemenuhan peraturan yang berlaku di Indonesia (Maksum, 2005). Perusahaan publik di Indonesia hanya sekedar berusaha mematuhi ketentuan dalam peraturan jumlah minimal anggota dewan direksi sehingga berapapun jumlahnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh ($p\text{-value } 0,594 > 0,050$) karena adanya budaya yang berkembang di Indonesia, yang menganggap bahwa praktik *corporate governance* adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Mintara, 2008). Perusahaan yang berusaha menerapkan *corporate governance* dengan baik akan tetap mengungkapkan informasi yang memadai, tidak peduli apakah profitabilitasnya tinggi atau rendah untuk memenuhi prinsip-prinsip *corporate governance*, salah satunya adalah pengungkapan dan transparansi. *Leverage* tidak berpengaruh ($p\text{-value } 0,397 > 0,050$) dikarenakan jika memiliki *leverage* tinggi perusahaan akan lebih dimonitor oleh *stakeholders*, dimana sebagian perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* (Sejjaka, 2004) dan sebagian

perusahaan yang lain berusaha untuk mengurangi pengungkapan informasi agar tidak menjadi sorotan *debtholders* (Suhardjanto dan Afni, 2009).

V. Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: **Pertama**, hasil penelitian menunjukkan rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah 69,900%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa di Indonesia dalam mengungkapkan informasi yang wajib diungkapkan sesuai dengan ketentuan IFRS masih rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pengungkapan 100,000% oleh BAPEPAM-LK. **Kedua**, struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Variabel independen dan variabel kontrol lainnya tidak berpengaruh.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: **Pertama**, checklist yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS masih bersifat umum, belum menggolongkan mana item yang termasuk wajib dan sukarela sehingga item pengungkapan wajib diidentifikasi oleh penulis bersama rekan penulis kemudian divalidasi oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang *concern* terhadap IFRS dan perkembangannya. **Kedua**, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan jasa, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan.

VI. Daftar Pustaka

- Adams, R. B., dan D. Ferreira. 2004. Gender Diversity in the Boardroom. *ECGI Working Paper Series in Finance, Stockholm*: 1-19.
- Adina, P., dan P. Ion. 2008. Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Akhtaruddin, M., M. A. Hossain, M. Hossain dan L. Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Journal of Accounting and Management Review* 7 (1): 1-20.
- Al-Akra, M., I. A., Eddie dan M. J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 42: 170–186.
- Al-Mutawaa, A., dan A. M. Hewaidy. 2010. Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Quaiy Companies. *International Business and Economics Research Journal* 9 (5): 33-49.
- Andres, P., V. Azofra, dan F. Lopez. 2005. Corporate Boards in OECD Countries: Size, Composition, Functioning and Effectiveness. *Journal of Corporate Governance* 13 (2): 197-210.
- Anjani, P. R.W. 2009. *Melawan Represi Budaya Patriarkat*. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro: 1-49.
- Apostolou, A. K., dan K. A. Nanopoulos. 2009. Voluntary Accounting Disclosure and Corporate Governance: Evidence from Greek Listed Firms. *International Journals of Accounting and Finance* 1 (4): 395-414.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2010. Kajian tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-negara Anggota ACMF. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2010/PEDOMAN_GCG_DI_NEGARA_ANGGOTA_ACMF.pdf. 26 Februari 2012.
- Chen, R. 2009. International Accounting Standards. Future Adoption of IFRS in Japan and The Japanese Accounting System. *Externredovisning Och Företagsanalys* No. 08-09-130: 1-40.
- Cheng, E. C. M., dan S. M. Courtenay. 2004. Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure. *The International Journal of Accounting* 41 (3):1-48.
- Deloitte Touche Tohmatsu. 2009. *International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2009*. <http://www.iasplus.com/fs/2009ifrschecklist.pdf>. 15 April 2011.

- _____. 2010. *International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2010*. <http://www.iasplus.com/fs/2010ifrschecklist.pdf>. 15 April 2011.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Drennan, G., dan C. Mariglia. 2010. *Attitudes to IFRS V2.0*. Toronto: BDO Canada LLP.
- Feijoo, B. F., S. Romero, dan S. Ruiz. 2012. Does Board Gender Composition Affect Corporate Social Responsibility Reporting? *International Journal of Business and Social Science* 3 (1): 31-38.
- Fekete, S., D. Matisz., dan J. Lukács. 2008. Factors Influencing the Extent of Corporate Compliance with IFRS. The Case of Hungarian Listed Companies. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 1 (10): 2-13.
- Felo, A. J., S. Krishnamurthy, dan S. A. Solieri. 2003. Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis. *Working Paper Series*: 1-40.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II (2).
- Gamayuni, R. R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14 (2): 153-166.
- Gujarati, D. N. 2009. *Basic Econometrics*. New York: Mc. Graw-Hill.
- Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391-430.
- Haryono, T. 2006. *Telaah Persepsi Kualitas Pelayanan Jasa Serta Penerapannya di Sektor Publik Dalam Memasuki Era Reformasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*. Majalah Usahawan No. 10. Th XXIX, Oktober: 25-32.
- Huafang, X., dan Y. Jianguo. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure. *Managerial Auditing Journal* 22 (6): 604-619.

- Husin, E. Z. 2008. *51 Tahun IAI & Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia ke International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No. 14/Tahun III/ Februari.
- Kent, P., dan J. Stewart. 2008. Corporate Governance and Disclosures on The Transition to International Financial Reporting Standards. *Journal of Accounting & Finance* 48 (4): 649-671.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan P. Sastra. 2007. Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9 (2): 88-98.
- Lama, M. V., H. M. Sánchez, dan J. N. R. Sobrino. Disclosure Level and Compliance in IFRS and the Conception of Reliability: An Empirical Investigation in Spain and the United Kingdom. *Journal of Accounting & Finance* 48 (4): 1-20.
- Loucks, J. S. 2003. *Regression Analysis: Model Building*. Austin: South Western/Thomson Learning.
- Lynch, M. 2000. *How to Read A Financial Reports*. New Brunswick: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
- Maksum, A. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Mintara, Y. H. 2008. *Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap Pengungkapan Informasi*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muntoro, R. K. 2005. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Majalah Usahawan Indonesia No.11 Tahun XXXVI.
- Nalikka, A. 2009. Impact of Gender Diversity on Voluntary Disclosure in Annual Reports. *Journal of Accounting & Taxation* 1 (1): 101-113.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-26.
- Novianti, L. 2009. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14 (2): 211-232.
- Perramon, J., dan O. Amat. 2007. IFRS Introduction And Its Effect On Listed Companies In Spain. *Working Paper Series*: 1-27.

- Prayogi, W. E. 2011. *Bapepam Telusuri Salah Catat Laporan Keuangan Bakrie & Brothers*. <http://finance.detik.com/read/2011/05/02/183124/1630743/6/bapepam-telusuri-salah-catat-laporan-keuangan-bakrie-brothers>. 17 September 2011.
- PT Bursa Efek Indonesia. 2000. *Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit*. http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Regulation/ListingRegulation/id-ID/REGUL21_ID. 20 Agustus 2011.
- _____. 2004. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*. http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Regulation/ListingRegulation/id-ID/Peraturan_I-A_Gabung.pdf. 20 Agustus 2011.
- _____. 2010. *IDX Fact Book 2010*. <http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Publication/FactBook/FileDownload/Fact%20Book%202010.pdf>. 10 Agustus 2011.
- _____. 2011. *IDX Fact Book 2011*. <http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Publication/FactBook/FileDownload/IDX%20Fact%20Book%202011.pdf>. 10 Agustus 2011.
- Pusat Bahasa Indonesia. 2008. *Pengertian Struktur*. <http://kamusbahasa.indonesia.org/struktur>. 20 Agustus 2011.
- Sejjaaka, S. 2004. Corporate Mandatory Disclosure by Financial Institutions in Uganda. *Journal of Accounting and Corporate Financial Management in Emerging Markets Research in Accounting in Emerging Economies* 24: 123–148.
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. 2009. Praktik Corporate Disclosure di Indonesia. Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 14 (2): 125-139.
- _____ dan L. Miranti. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)* 13 (1): 63-77.
- _____ dan N. D. Permatasari. 2010. Pengaruh Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 14 (2): 151-164.
- Suhartini, D. 2006. Pengaruh Leverage, Jumlah Dewan Direksi, Reputasi Auditor dan Persentase Saham yang Ditawarkan Pada Publik Saat IPO Terhadap Earning Management. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6 (2): 64-75.
- The Enterprise Foundation. 1999. *Understanding Financial Statements*. Maryland: The Enterprise Foundation Inc.

Tsalavoutas, I., L. Evans, dan M. Smith. 2008. Comparison of Two Methods for Measuring Compliance with IFRS Mandatory Disclosure Requirements. *Journal of Applied Accounting Research* 11 (3):213-228.

_____ dan D. Dionysiou. 2011. Value Relevance of IFRS Mandatory Disclosure Requirements. *Journal of Applied Accounting Research*: 1-27.

Ujiyantho, H. A., dan B. A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-26.

Zaluki, N. A. Ahmad, dan W. N. W. Hussin. 2009. Corporate Boards, Audit Committees and Quality of Financial Disclosure in IPOs. *Malaysian Accountancy Research and Education Foundation*: 1-44.

Zhou, M. M., dan Panbunyuen, P. 2008. *The Association Between Board Composition and Different Types of Voluntary Disclosure, A Quantitative study of Chinese and Swedish Listed Companies*. Master Thesis Umeå Universitet.

www.idx.co.id

VII. Lampiran

Tabel 1

Rincian Jumlah Item pengungkapan dan IFRS yang Sudah Dikonvergensi kedalam PSAK untuk Periode 2009 dan 2010

No	Nomor PSAK	Nomor IAS	Tanggal Efektif	Jumlah Item
1	PSAK 13 (Rev.2007) Properti Investasi	IAS 40 <i>Investment Property</i>	01-01-08	25
2	PSAK 14 (Rev.2008) Persediaan	IAS 2 <i>Inventories</i>	01-01-09	4
3	PSAK 16 (Rev.2007) Aset tetap	IAS 16 <i>Property, Plant and Equipment</i>	01-01-08	28
4	PSAK 30 (Rev.2007) Sewa	IAS 17 <i>Leases</i>	01-01-08	21
5	PSAK 26 (Rev. 2008) Biaya Pinjaman	IAS 23 <i>Borrowing Costs</i>	01-01-10	2
Total Item				80

Sumber: www.iaiglobal.or.id dan *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist*

Tabel 2

Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Tahun	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
-------	---------	---------	------	----------------

2009	0,535	0,857	0,688	0,072
2010	0,541	0,875	0,716	0,075
Total	0,535	0,875	0,699	0,074

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOM	204	2,000	22,000	4,392	2,411
KOMIN	204	0,167	1,000	0,446	0,151
PEND	204	0,000	1,000	0,598	0,492
KOMWAN	204	0,000	1,000	0,352	0,179
KOMAUDIT	204	2,000	7,000	3,176	0,657
DIR	204	2,000	11,000	4,681	1,970
PROF	204	0,001	0,641	0,123	0,106
LEV	204	0,037	15,182	2,554	3,262
Valid N (listwise)	204				

Tabel 4
Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	0,708	12,092	0,000
KOM	0,002	0,025	0,980
KOMIN	0,112	3,364	0,001*
PEND	-0,015	-0,216	0,829
KOMWAN	0,008	0,114	0,909
KOMAUDIT	-0,018	-2,368	0,019*
DIR	-0,038	-0,538	0,591
PROF	-0,037	-0,533	0,594
LEV	0,063	0,849	0,397
R Square	0,079		
Adjusted R Square	0,070		
F	8,649		
Sig	0,000		

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

CURICULLUM VITAE PENELITI

1. Nama : Wardani Prawinandi
Jabatan : Alumni FE Universitas Sebelas Maret
No HP : 085 725 006 242
E-mail : prawinandi@gmail.com

2. Nama : Drs. DjokoSuhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, Ak.
Jabatan : Dosen FE Universitas Sebelas Maret
No HP : 085 629 843 99
E-mail : suhardjanto04@yahoo.com

3. Nama : Hanung Triatmoko
Jabatan : Dosen FE Universitas Sebelas Maret
No HP : 085 799 366 080
E-mail : hanungfeuns@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wardani Prawinandi

Judul Artikel : PERAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
KONVERGENSI IFRS

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang saya buat belum pernah didaftarkan atau dipublikasikan di jurnal lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 14 Juni 2012

Peneliti yang menyatakan

Wardani Pawinandi